

PENGARUH PEMBERDAYAAN PENGUSAHA MUSLIM BUGIS TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN BONE SULAWESI SELATAN

Syamsul Bahri

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bone
syamsulmaddussila@mail.com

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh pemberdayaan pengusaha muslim bugis terhadap pengentasan kemiskinan. Dalam operasionalnya akan menganalisis seberapa besar pengaruh pemberdayaan(X) terhadap pengentasan kemiskinan (Y), di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. Dilihat dari tujuannya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaruh pemberdayaan terhadap pengentasan kemiskinan diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 4,945 dengan signifikansi 0,000. Dengan demikian dikatakan bahwa pemberdayaan (X_1) berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan (Y).

(Kata kunci: Pemberdayaan, pengusaha muslim bugis, kemiskinan)

The study aims to investigate the influence of empowering Muslim entrepreneurs towards poverty alleviation. In its operation will analyze how much influence empowerment (X) on poverty alleviation (Y), in Bone Regency, South Sulawesi. Judging from its purpose, this research is included in quantitative research. Based on the results of the study, it is known that the influence of empowerment on poverty alleviation obtained a value of t_{hitung} of 4,945 with a significance of 0.000. Thus it is said that empowerment (X_1) has a significant effect on poverty alleviation (Y).

(Keywords: Empowerment, bugis muslim entrepreneurs, poverty)

Pendahuluan

Kemiskinan adalah kehidupan masyarakat yang berada pada tingkat ekonomi rendah, disaat masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kemiskinan menjadi masalah sosial yang sulit terhindarkan pada suatu daerah. Berbagai program dicanangkan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2011, Kabupaten Bone masih berada pada garis kemiskinan di atas rata-rata Propinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Meskipun demikian kemiskinan di Kabupaten Bone masih berada pada posisi sedang diantara beberapa Kabupaten di Sulawesi Selatan.

Tabel
Data Kemiskinan Sulawesi Selatan

Daerah	Garis Kemiskinan (Rp/Bulan)		Persentase Penduduk Miskin (%)		Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Selayar	180 355	203 726	16,41	14,98	19 834	18 261
Bulukumba	177 859	200 907	10,50	9,02	41 122	35 594
Bantaeng	142 972	161 499	9,96	10,24	17 211	18 116
Jeneponto	188 731	213 188	20,58	19,09	68 219	65 322
Takalar	179 994	203 319	11,06	11,16	28 325	30 026
Gowa	195 452	220 780	10,93	9,49	67 013	61 882
Sinjai	169 415	189 004	11,37	10,68	25 766	24 444
Maros	212 544	237 119	16,35	14,62	49 777	46 522
Pangkajene Kepulauan	185 923	207 420	19,35	19,26	57 367	58 872
Barru	194 138	216 585	11,43	10,68	18 476	17 716
Bone	167 601	189 320	15,19	14,08	107 271	100 990
Soppeng	170 178	180 352	9,95	10,41	22 784	23 298
Wajo	196 543	208 293	8,93	8,96	33 770	34 473
Sidenreng Rappang	185 330	196 410	6,73	6,99	16 857	19 001
Pinrang	176 376	186 920	8,70	9,01	30 320	31 631
Enrekang	190 151	204 861	18,10	16,84	34 239	32 023
Luwu	184 095	198 336	16,96	15,43	55 227	51 363
Tana Toraja	172 445	185 785	16,14	14,61	75 240	32 409
Luwu Utara	192 085	206 944	16,40	16,24	52 455	46 708
Luwu Timur	184 242	198 494	8,91	9,18	21 013	22 296
Toraja Utara		249 111		19,08		41 087
Kota Makassar	209 582	233 815	5,52	5,86	69 667	78 467
Kota Pare-Pare	188 525	199 796	6,52	6,53	7 685	8 455
Kota Palopo	185 464	199 811	11,85	11,28	17 260	16 702
Sulawesi Selatan	153 715	163 089	12,31	11,6	936 898	915 660
Indonesia	200 262	211 726	14,15	13,33	32.530.000	31.023.390

Sumber : Badan Pusat Statistik

Data di atas menunjukkan bahwa penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Bone tahun 2009 – 2010 tidak signifikan. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan angka kemiskinan tidak mampu di tekan, kurangnya lapangan kerja, Sumber Daya Alam yang belum di kelolah dengan baik, dan sumber daya manusia itu sendiri.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita Kabupaten Bone pada tahun 2010 mencapai Rp. 10.492.627. PDRB Kabupaten Bone atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 7.530.369,81. Sedangkan jika dihitung atas dasar harga konstan berada pada kisaran Rp. 4.447.682, dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 7,63 persen. Hasil perhitungan PDRB di Kabupaten Bone dalam lima tahun terakhir menurut jenis lapangan usaha terdiri dari delapan sektor, yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air minum, sektor bangunan/konstruksi, sektor perdagangan, sektor angkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewahan dan jasa perusahaan. Aktivitas perekonomian masih di dominasi oleh sektor pertanian sekitar 49,09 persen (Dinas Pendapatan Daerah Kab. Bone 2013).

Daerah teritorial Kabupaten Bone yang berada pada pesisir Sulawesi Selatan, memiliki posisi strategis dalam perdagangan barang dan jasa di kawasan Indonesia Timur, khususnya perdagangan barang hasil pertanian. Dengan dukungan tersebut maka salah satu alternatif untuk mendukung pengentasan kemiskinan yaitu dengan meningkatkan kepedulian dan mendorong masyarakat dalam dunia usaha.

Pengusaha atau saudagar merupakan ciri yang melekat pada mayoritas orang Bugis. Setiap daerah di Indonesia terdapat terdapat orang Bugis pekerjaan utama pedagang atau pengusaha. Terbukti setiap tahun diadakan pertemuan saudagar Bugis-Makassar yang dihadiri ratusan perwakilan saudagar baik dari daerah maupun luar Sulawesi Selatan.

Penelitian yang telah dilakukan oleh suryawati salam menunjukkan bahwa pengusaha Bugis –Makassar memiliki 9 sifat yakni; etos kerja yang tinggi, jujur, hemat, teliti, dapat dipercaya, ramah, berani mengambil resiko, dapat menyimpan rahasia, dan persatuan usaha yang kuat. Terdapat satu sifat yang signifikan yakni bermoral dengan

tingkat kesepakatan yang tinggi. Akan tetapi terdapat perilaku pengusaha Bugis yang negatif yaitu pengusaha Bugis Makassar suka menggampangkan suatu masalah. Tidak melihat sesuatu sebagai hal yang rumit, cenderung meremehkan, sehingga kerap salah langkah dalam mengambil keputusan. Juga sering gegabah dan tidak berhitung secara cermat karena spekulatif. Pengusaha Bugis Makassar juga belum mampu untuk membangun kepercayaan terhadap bank-bank besar. Takut mengambil resiko dalam hal peminjaman modal sehingga tidak jarang mereka tersaingi oleh pengusaha dari suku lain.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan pada suatu Negara dengan melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pembangunan dapat terlaksana dengan adanya sinergitas dari berbagai elemen, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Henry Faizal Noor (2013) mengemukakan bahwa aktor atau pelaku ekonomi dalam suatu Negara dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu penyelenggaraan Negara (*political Society*), kelompok dunia usaha (*Business Society*), dan kelompok masyarakat madani (*Civil Society*). Ketiga kelompok tersebut sangat penting peranannya dalam rangka pelaksanaan pembangunan dalam suatu Negara. Setiap kelompok masyarakat menjalankan fungsi dan wewenangnya masing-masing, sehingga akan tercipta masyarakat yang dinamis.

Kelompok dunia usaha merupakan aktor atau pelaku kegiatan ekonomi publik yang terlihat nyata peranannya di lapangan. Kelompok inilah yang menggerakkan ekonomi publik, yang menciptakan nilai tambah (*value added*) di tengah masyarakat, seperti membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, menghasilkan barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat, membayar pajak dan retribusi kepada Negara.

Mengingat peranannya dalam pembangunan, dunia usaha harus terus dikembangkan dengan semangat kekeluargaan, saling memperkuat antara usaha yang kecil dan besar dalam rangka pemerataan serta mewujudkan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelompok dunia usaha sebagai penopang perekonomian harus diberdayakan. Pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan iklim usaha.

Kurangnya pemberdayaan bagi pengusaha menjadi sebab pengentasan kemiskinan belum terlihat hasilnya, karena dalam kenyataannya memperlihatkan kecenderungan pengusaha tidak diberdayakan secara aktif. Padahal secara teori, dengan pemberdayaan pengusaha maka akan menciptakan lapangan pekerjaan, terbukanya lapangan pekerjaan akan mengurangi pengangguran yang akan berimplikasi pada penurunan angka kemiskinan.

Tinjauan Pustaka

Konsep pemberdayaan secara umum dapat digambarkan sebagai bentuk adanya pemberian kewenangan dan kesempatan bagi individu atau kelompok masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas. Pemberdayaan sangat penting ditegakkan bagi masyarakat, sebagai perwujudan partisipasi masyarakat sebagai sumber daya pembangunan, agar mampu mengenali permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan dan menunjang diri menuju keadaan yang lebih baik.

1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan dalam bahasa Inggris disebut dengan *empowerment*. Sedarmayanti (2011) mengemukakan bahwa *empowerment* asalnya dari kata “*power*” yang artinya “*control, authority, dominion*”. Awalan “*emp*” artinya “*on put to*” atau “*to cover with*” jelasnya “*more power*”. Jadi *empowering* artinya “*passing on authority and responsibility*”.

Pemberdayaan sebagai terjemahan *empowering* mengandung dua pengertian, pertama *to give power or authority to* atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain, kedua *to give ability to* atau *enable*, usaha untuk memberi kemampuan atau keberdayaan. Dengan demikian secara eksplisit dalam kedua ini adalah bagaimana menciptakan peluang untuk mengaktualisasikan keberdayaan seseorang.

Unsur utama dari proses pemberdayaan masyarakat adalah pemberian kewenangan dan pengembangan kapasitas. Kedua unsur ini tidak dapat dipisahkan. Apabila masyarakat telah memperoleh kewenangan tetapi tidak memiliki kapasitas untuk menjalankan kewenangan tersebut maka hasilnya tidak akan optimal. Menurut Korten,

memahami *power* tidak cukup hanya dari dimensi distributif akan tetapi juga dari dimensi generatif. Pelaksanaan pemberdayaan pada masyarakat lokal termanifestasikan dalam berbagai tindakan kolektif dalam rangka melakukan perubahan kondisi kehidupan masyarakat. Tindakan kolektif tersebut merupakan cerminan kapasitas masyarakat dalam melakukan pengelolaan pembangunan secara mandiri, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi pembangunan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, secara umum pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan, memberikan kesempatan untuk mengatur dan melaksanakan hak dan tanggungjawabnya selaku anggota masyarakat.

2. Bentuk-bentuk Pemberdayaan Ekonomi

Konsep pemberdayaan bidang ekonomi dapat dilakukan dengan pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Kedaulatan ekonomi harus diberikan sepenuhnya kepada rakyat. Pemberdayaan ekonomi rakyat merupakan usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar.

Pemberdayaan pada bidang ekonomi dapat dilakukan dengan memberikan penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan pemberian kesempatan untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.

Menurut Adam Smith masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang warganya memiliki simpati, yang memberi perhatian pada nasib orang lain. Konsep ini dikenal dengan masyarakat bersahabat. Masyarakat bersahabat merupakan masyarakat yang dibangun atas dasar kebutuhan fisik dan psikologi. Ekonomi tidak hanya mengurus

masalah kebutuhan fisik, tetapi harus berkembang dari penghargaan terhadap manusia (Mikhael dua, 2008). Dengan timbulnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya untuk saling menghargai maka akan menciptakan kemitraan, gotong royong, saling membantu dalam kehidupan masyarakat.

Sumidiningrat (1999) mengemukakan bahwa kebijakan dalam pembedayaan ekonomi rakyat dapat dilakukan dengan pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal), memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekadar *price taker*; pelayanan pendidikan dan kesehatan, penguatan industri kecil, mendorong munculnya wirausaha baru, dan pemerataan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup peningkatan akses bantuan modal usaha, peningkatan akses pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), dan peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.

a. Bantuan Modal

Faktor modal menjadi salah satu hal penting dalam pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi. Pemecahan aspek modal penting dan memang harus dilakukan. Perlu dicermati dalam usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi melalui aspek permodalan adalah: *pertama*, bagaimana pemberian bantuan modal tidak menimbulkan ketergantungan masyarakat. *Kedua*, bagaimana pemecahan aspek modal dilakukan melalui penciptaan sistem yang kondusif bagi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah untuk mendapatkan akses di lembaga keuangan.

Ketiga, bagaimana skema penggunaan atau kebijakan pengalokasian modal ini tidak terjebak pada perekonomian subsisten. Oleh karena itu, cara untuk memfasilitasi pemecahan masalah permodalan untuk usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, adalah dengan menjamin kredit mereka di lembaga keuangan yang ada, dan atau memberi subsidi bunga atas pinjaman mereka di lembaga keuangan. Cara ini selain mendidik mereka untuk bertanggung jawab terhadap pengembalian kredit, juga dapat menjadi wahana bagi mereka untuk terbiasa bekerjasama dengan lembaga keuangan yang ada,

serta membuktikan kepada lembaga keuangan bahwa tidak ada alasan untuk diskriminatif dalam pemberian pinjaman (Mardi Yatmo Hutomo, 2000).

b. Bantuan Pembangunan Prasarana

Usaha mendorong produktivitas dan mengembangkan usaha, tidak akan memiliki arti jika hasil produksi tidak dapat dipasarkan, atau dengan harga yang rendah. Oleh sebab, itu komponen penting dalam usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi adalah pembangunan prasarana produksi dan pemasaran. Tersedianya prasarana pemasaran dan atau transportasi dari lokasi produksi ke pasar, akan mengurangi rantai pemasaran dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan petani dan pengusaha mikro, pengusaha kecil, dan pengusaha menengah.

c. Bantuan Pendampingan

Tugas utama pendamping ini adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk penguatan kemitraan baik antara usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah dengan usaha besar. Yang perlu dipikirkan bersama adalah mengenai siapa yang paling efektif menjadi pendamping masyarakat. Konsep yang dapat menjadi pertimbangan adalah membentuk suatu wadah yang khusus mendampingi pengusaha. Wadah ini dapat dilakukan oleh pemerintah, atau oleh pihak ketiga (penyedia modal).

d. Penguatan Kemitraan Usaha

Penguatan ekonomi rakyat atau pemberdayaan masyarakat dalam ekonomi, tidak berarti mengalienasi pengusaha besar atau kelompok ekonomi kuat. Karena pemberdayaan memang bukan menegasikan yang lain, tetapi *give power to everybody*. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah penguatan bersama, dimana yang besar hanya akan berkembang kalau ada yang kecil dan menengah, dan yang kecil akan berkembang kalau ada yang besar dan menengah. Daya saing yang tinggi hanya ada jika ada keterkaitan antara yang besar dengan yang menengah dan kecil. Sebab hanya dengan keterkaitan produksi yang adil, efisiensi akan terbangun. Oleh sebab itu, melalui

kemitraan dalam bidang permodalan, kemitraan dalam proses produksi, kemitraan dalam distribusi, masing-masing pihak akan diberdayakan.

Dengan demikian pemberdayaan ekonomi dapat diimplementasikan melalui peningkatan kekuatan bagi pengusaha, baik pengusaha kecil maupun pengusaha besar. Pemberdayaan ekonomi dilakukan dalam produksi, distribusi maupun konsumsi. Pemberdayaan ekonomi dapat diciptakan dengan adanya sinergitas antara pemerintah sebagai penentu regulasi, pihak ketiga sebagai penyedia modal, serta masyarakat itu sendiri yang akan menekuni dunia usaha.

Sebagian besar usaha nasional di Indonesia adalah sektor Usaha Mikro Kecil Menengah. Sektor ini menciptakan lapangan kerja lebih dari 90% dari total usaha nasional, menyumbang sampai 60% *output* yang dihasilkan usaha nasional. Usaha kecil seharusnya menjadi prioritas pembangunan karena bersentuhan langsung dengan *grassroot* sehingga berpotensi menjadi penggerak sektor riil dan mengurangi pengangguran (Euis Amalia, 2009).

Dalam rangka mewujudkan sasaran pemberdayaan dalam bidang usaha terutama bidang koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) maka dilaksanakan berbagai kebijakan, diantaranya: *Pertama*, mengembangkan UMKM agar memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing.

Kedua, memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik dan berwawasan gender dengan cara memperbaiki lingkungan usaha dan menyederhanakan perisinan, memperluas pada akses permodalan, menjalankan fungsi intermediasi sebagai penyedia jasa pengembangan dunia usaha, teknologi, pemasaran, manajemen, dan informasi.

Ketiga, memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru yang berkeunggulan. Mengembangkan UMKM melalui pendekatan kluster di sektor agrobisnis dan agroindustri disertai kemudahan dalam pengelolaan usaha. Mengembangkan UMKM untuk lebih berperan dalam proses industrialisasi, percepatan

pengalihan teknologi, dan peningkatan SDM. Selanjutnya mengintegrasikan pengembangan usaha dalam konteks pengembangan regional sesuai dengan karakteristik pengusaha dan potensi usaha unggulan setiap daerah.

Implementasi pemberdayaan dalam Islam dapat dilakukan melalui penguatan kelembagaan dalam berbagai hal diantaranya pembentukan *empowering center*. *Empowering Center* (EC) diaplikasikan dalam prinsip sistem tolong menolong, survei, karakter dan komitmen kemitraan, serta fasilitator, (Muhammad Budi Djatmiko, 2012).

1. Prinsip Tolong Menolong

Prinsip tolong menolong dilakukan dengan datangnya mitra kepada *empowering center* atau sebaliknya untuk melakukan kerja sama. Hal ini didasarkan sesuai dengan Al-qur'an dan hadits. Rasulullah SAW memerintahkan seluruh umatnya untuk saling tolong menolong dalam kesulitan dengan menyebutkan bahwa tangan di atas lebih utama kedudukannya daripada tangan di bawah. Saling membantu dalam menyebarkan kebaikan dan berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan.

Dengan dasar prinsip tolong menolong maka *empowering center* diaplikasikan dalam bentuk sebagai berikut :

- a. *Empowering Center* sebuah pusat pemberdayaan yang secara fungsi dapat bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan potensi, memberikan pendidikan dan pembinaan, menjadi fasilitator pemberdayaan dari masyarakat dan untuk masyarakat. Selain itu *empowering center* juga dapat menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah yang terkumpul dari pihak ketiga untuk disalurkan kepada kaum yang membutuhkan;
- b. *Empowering Center* dilakukan kegiatan dengan mengadopsi sosok Rasulullah. Memiliki empat nilai dasar yang diterapkan dalam suatu organisasi, yaitu *sidik* (benar), *amanah* (terpercaya) *fatimah* (cerdas), dan *tablik* (menyampaikan), (Muhammad Budi Djatmiko, 2012).

2. Survei

Sebelum melakukan kerja sama dengan mitra maka hal yang dilakukan adalah melakukan survei untuk mengenal lebih jauh tentang calon mitra tersebut. Implementasi survei dalam *Empowering Center* harus dilakukan dengan cermat agar dapat dilakukan keputusan yang tepat. Melalui survei *Empowering Center* dapat memetakan kendala atau masalah yang dihadapi oleh mitra untuk selanjutnya dapat diberikan solusi.

3. Karakter dan Komitmen Mitra

Ada dua parameter yang perlu dicermati sebelum menjalin kemitraan dengan pihak lain yaitu karakter dan komitmen. Kedua hal tersebut harus dimiliki oleh kedua belah pihak. Karakter dan komitmen kedua belah pihak akan mempengaruhi kelancaran kerja sama dalam sebuah lembaga, baik skala kecil maupun dalam skala besar.

Pembentukan karakter dan komitmen dapat dilakukan melalui program pelatihan yang akan mendukung visi dan misi *Empowering Center* sebagai sebuah pusat pemberdayaan. Pembinaan dan pelatihan harus dilakukan terus menerus, dengan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang terlibat baik secara internal maupun eksternal. Melalui pembentukan karakter dan komitmen *Empowering Center* dapat mensosialisasikan keberadaannya agar masyarakat luas dapat ikut berpartisipasi dalam pemberdayaan tersebut.

4. Fasilitator

Empowering Center dapat bertindak sebagai fasilitator terhadap pihak ketiga sebagai penyandang dana. Ada tiga sistem yang dapat ditawarkan kepada kedua mitra. *Pertama, profit –loss sharing* yaitu kerja sama dengan sistem bagi hasil keuntungan dan rugi dengan akad sesuai syariat. *Kedua, qardhul hasan*, yaitu dana bergulir atau pinjaman tanpa bunga dengan pengembalian dana pokok untuk dimanfaatkan bagi masyarakat yang lain. *Ketiga*, penerimaan dan penyaluran zakat, infak dan sedekah.

3. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi

Konsep pemberdayaan (*empowering*) secara umum kerap dipahami sebagai bagian dari percaturan ekonomi yang bertujuan meningkatkan usaha rakyat kecil atau

masyarakat tertinggal melalui metode-metode alternatif. Sedangkan dalam pemahaman luas, pemberdayaan memiliki keterkaitan dengan upaya untuk mengimbangi kekuatan yang mengancam atau mendominasi suatu kegiatan yang mengalami hambatan untuk berkembang. Dalam lingkup transformasi budaya, pemberdayaan dapat dipandang sebagai upaya-upaya masyarakat untuk memberdayakan dan menyesuaikan diri terhadap dinamika budaya yang tengah berlangsung. Sedangkan dalam masyarakat modern, gerakan-gerakan pemberdayaan kerap ditafsirkan sebagai upaya perlawanan, perimbangan, penyetaraan, ataupun pendinamisasian satu kegiatan yang mengalami pemampatan, kurang kreatif, atau mereka yang terpinggirkan, (Agus Soehari, 2007).

Terdapat beberapa tujuan dari pemberdayaan, sebagaimana diungkapkan Ginandjar kartasasmita, diantaranya: *pertama* menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang (*enabling*). Asumsi dasar yang dibangun adalah bahwa setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan dilakukan dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Untuk memperkuat potensi masyarakat yang telah dimiliki diperlukan langkah-langkah lebih positif dan nyata, menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Upaya yang paling penting untuk dilakukan adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar baik fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di perdesaan.

Ketiga, memberdayakan juga bertujuan untuk melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah. Oleh karena itu,

perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdikan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Dengan demikian pemberdayaan pada hakikatnya bertujuan untuk melakukan perubahan pola pikir serta sosial masyarakat. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku untuk semua, tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Sungguh penting di sini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada pengusaha muslim Bugis di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan.

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan termasuk ke dalam penelitian eksplanatoris (*explanatory research*). Dikatakan demikian, karena penelitian ini menghubungkan 2 (dua) variabel, yaitu pemberdayaan sebagai variabel bebas (*independent variable*, dengan notasi statistik X) serta pengentasan kemiskinan sebagai variabel terikat (*dependent variable*, dengan notasi statistik Y).

b. Populasi dan Sampel

Sumber penelitian ini adalah pengusaha muslim bugis di Kabupaten Bone. Akan tetapi, karena terlalu banyak maka penelitian difokuskan pada sampel, yang ukurannya

ditentukan dengan teknik sampel acak (*random sampling technique*) dengan menggunakan rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1+N.e^2}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = tingkat pemahaman sampel, dalam hal ini ditetapkan 10 %.

Sesuai data pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bone terdapat sekitar 866 pengusaha yang telah memiliki izin. Dengan demikian dapat ditentukan sampel sekitar 100 pengusaha dengan perhitungan sebagai berikut ;

$$N = 866$$

$$e = 10 \%$$

$$n = \frac{866}{1+866.10\%}$$

$$n = \frac{866}{867 \times 0.01} = \frac{866}{8,67} = 99.89 (100)$$

c. Jenis Data

Data penelitian ini adalah:

- a. Data tentang pemberdayaan;
- b. Data tentang pengentasan kemiskinan;

Masing-masing data tersebut dioperasionalkan ke dalam subvariabel dan indikator.

d. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner disusun dalam bentuk angket dan disediakan lima opsi pilihan dengan teknik skala *likert*. Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala *likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel untuk dijadikan

sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.

Keseluruhan angket di susun dengan teknik *self report*, yaitu dengan meminta responden untuk memberikan penilaian sesuai dengan tanggapan atau kesan mereka. Alternatif pilihan yang disediakan terdiri atas, Sangat Sering, Sering, jarang, pernah, tidak pernah. Untuk pernyataan positif, masing-masing pilihan ini diberikan bobot penilaian 5 untuk pilihan “Sangat Sering” (SS), 4 untuk pilihan “Sering” (S), 3 untuk pilihan “Jarang” (J), 2 untuk pilihan “Pernah” (P), 1 untuk pilihan “Tidak Pernah” (TP). Untuk pernyataan negative skor nilai diterapkan secara terbalik.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitasnya, maka dilakukan pengujian.

1. Uji Validitas

Validitas alat ukur menentukan sejauh mana alat ukur penelitian mampu mengukur variabel yang terdapat dalam suatu penelitian, atau dengan kata lain bahwa validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat akurasi suatu alat ukur, menggunakan pendekatan korelasi *Product Moment Pearson Correlation*, dengan rumus:

$$r_{xy} = \frac{n \sum x_1 y_1 - (\sum x_1)(\sum y_1)}{\sqrt{\{n \sum x_1^2 - (\sum x_1)^2\} \{n \sum y_1^2 - (\sum y_1)^2\}}}$$

Dalam hal ini :

r_{xy} = Koefisien Korelasi antara variable X dengan Y

$\sum x$ = Jumlah Skor item

$\sum y$ = Jumlah Skor item

x = $(x_1 - \bar{x})$

y = $(y_1 - \bar{y})$

Jika koefisien korelasinya lebih besar daripada 0,25 maka butir angket dianggap valid. Sebaliknya, jika kurang daripada 0,25, maka dianggap tidak valid.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas suatu instrumen pengukuran didefinisikan sebagai suatu kemampuan instrumen guna mengukur secara konsisten terhadap fenomena yang dirancang untuk diukur. Pentingnya memiliki reliabilitas instrument pengukuran. Setidaknya untuk dua alasan : a) Reliabilitas merupakan suatu prasyarat bagi validitas pengujian dan (b) Penelitian menghendaki agar bisa menentukan pengaruh dan suatu variabel atas variabel lainnya. Untuk menguji reliabilitas alat ukur, terlebih dahulu dicari harga korelasi secara keseluruhan dengan menggunakan korelasi Product Moment. Adapun rumus yang digunakan :

$$S_{12} = \frac{\sum X_1^2}{n} - \frac{(X_1)^2}{n}$$

$$S_{12} = \frac{\sum K_1^2}{n} - \frac{(JKS)^2}{n^2}$$

Dalam hal ini:

- JKi = Jumlah kuadrat dari seluruh skor item
- JKs = Penjumlahan dari hasil kuadrat subjek
- n = Jumlah responden

Mencari koefisien reliabilitas dengan menggunakan rumus Alfa Croanbach;

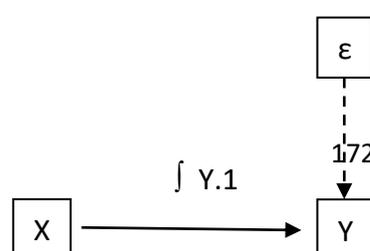
$$r_1 = \left\{ \frac{k}{5-1} \right\} \left\{ \frac{1 - \sum S_1^2}{S_1^2} \right\}$$

Dalam hal ini :

- r1 = Koefisien korelasi
- $\sum S_{12}$ = Jumlah varian item
- K = Banyaknya butir pertanyaan
- S12 = Varian total

3. Analisis Data

Paradigma penelitian ini adalah



Sesuai dengan paradigma tersebut, maka hipotesis yang diuji dalam penelitian adalah sebagai berikut:

H_0 : Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari pemberdayaan terhadap pengentasan kemiskinan;

H_1 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari pemberdayaan terhadap pengentasan kemiskinan;

$H_0 : \rho_{Y.1} = 0$ $H_1 : \rho_{Y.1} > 0$

Semua data hasil penyebaran angket ini diberi skor dan dianalisis dengan menggunakan uji statistik. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik korelasi dan regresi, yaitu dengan korelasi sederhana untuk menentukan hubungan variabel X dengan Y, regresi sederhana untuk menentukan kontribusi variabel X terhadap variabel Y.

Untuk menggunakan analisis regresi, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu: (1) sampel diambil secara acak, (2) variabel berhubungan secara linear, dan (3) variabel berdistribusi normal atau mendekati normal. Kebermaknaanya dilakukan dengan uji t.

Semua notasi rumusan statistik di atas dikutip dari buku "Statistics for the Behavioral Sciences" karya Gravetter dan Wallnau (1985: A-73-85) dan proses perhitungannya akan dilakukan dengan menggunakan alat Bantu computer serial SPSS 21.0 for window kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sesuai kebutuhan analisis.

Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Objek Penelitian

Kabupaten Bone adalah salah satu Daerah otonom di provinsi Sulawesi Selatan. Ibu kota kabupaten ini terletak di Watampone. Kabupaten Bone sebagai salah satu daerah yang berada di pesisir timur Sulawesi Selatan memiliki posisi strategis dalam perdagangan barang dan jasa di Kawasan Timur Indonesia yang secara administratif terdiri dari 27 kecamatan, 333 desa dan 39 kelurahan. Batas-batas wilayah meliputi sebelah utara Kabupaten Wajo dan Kabupaten Soppeng, Selatan berbatasan dengan

Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Gowa, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Maros, Pangkep dan Barru, sebelah timur Teluk Bone. Luas wilayah Kabupaten Bone 4.559 km² dengan rincian lahan persawahan 88.449 Ha, tegalan/Ladang 120.524 Ha, tambak/empang 11.148 Ha, perkebunan Negara/swasta 43.052,97 Ha, hutan 145.073 Ha, Padang rumput dan lainnya 10.503,48 Ha. (Bone dalam angka, 2013).

2. Pembahasan

Analisis data dalam penelitian ini untuk memberikan informasi dan gambaran umum tentang data yang telah terkumpul. Variabel yang diukur dalam penelitian ini meliputi data variabel Pemberdayaan (X) sebagai variabel *independent* dan variabel pengentasan kemiskinan (Y) sebagai variabel *Dependen*.

Variabel pemberdayaan (X) diukur dengan menggunakan angket sebanyak 19 butir soal. Angket tersebut dibagikan kepada 100 pengusaha muslim bugis sebagai responden. Setiap butir item angket diberi skor tertinggi 5 dan terendah 1. Setelah diinventarisasi dan diidentifikasi masing-masing jawaban responden terhadap 19 butir item angket yang dibagikan, hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel
Tanggapan Responden Tentang Penggunaan Modal Sendiri

Pilihan	Jawaban	Persentase
Sangat Sering	40	40%
Sering	54	54%
Jarang	6	6%
Pernah	0	0%
Tidak Pernah	0	0%
Jumlah	100	100%

Sumber: Penelitian di Kabupaten Bone Tahun 2014

Tabel di atas menunjukkan bahwa ketika Pengusaha Muslim Bugis di Kabupaten Bone dimintai pendapat tentang apakah menggunakan modal sendiri dalam melakukan usaha. Hasilnya yaitu: sangat sering 40 orang (40%), sering 54 orang (54%), jarang 6 orang

(6%), pernah 0 orang (0%) dan tidak pernah 0 orang (0%). Dengan demikian data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pengusaha sering menggunakan modal sendiri dalam berwirausaha dengan angka 54 %.

Tabel

Tanggapan Responden Tentang Kesulitan dalam Permodalan

Pilihan	Jawaban	Persentase
Sangat Sering	36	36%
Sering	52	52%
Jarang	7	7%
Pernah	5	5%
Tidak Pernah	0	0%
Jumlah	100	100%

Sumber: Penelitian di Kabupaten Bone Tahun 2014

Tabel di atas menunjukkan bahwa ketika Pengusaha Muslim Bugis di Kabupaten Bone dimintai pendapat tentang apakah mengalami kesulitan dalam permodalan. Hasilnya yaitu: sangat sering 36 orang (36%), sering 52 orang (52%), jarang 7 orang (7%), pernah 5 orang (5%) dan tidak pernah 0 orang (0%). Dengan demikian data tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 52% pengusaha mengalami kesulitan dalam permodalan.

Tabel

Tanggapan Responden Tentang Tersedianya Pembeli produk

Pilihan	Jawaban	Persentase
Sangat Sering	24	24%
Sering	64	64%
Jarang	8	8%
Pernah	4	4%
Tidak Pernah	0	0%
Jumlah	100	100%

Sumber: Penelitian di Kabupaten Bone Tahun 2014

Tabel di atas menunjukkan bahwa ketika Pengusaha Muslim Bugis di Kabupaten Bone dimintai pendapat tentang apakah lokasi terdapat pembeli produk. Hasilnya yaitu: sangat sering 24 orang (24%), sering 64 orang (64%), jarang 8 orang (8%), pernah 4 orang (4%) dan tidak pernah 0 orang (0%). Dengan demikian data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas di lokasi pengusaha terdapat pemebeli produk dengan persentase sebanyak 64%.

Tabel

Tanggapan Responden Ketersediaan sarana

Pilihan	Jawaban	Persentase
Sangat Sering	41	41%
Sering	48	48%
Jarang	11	11%
Pernah	0	0%
Tidak Pernah	0	0%
Jumlah	100	100%

Sumber: Penelitian di Kabupaten Bone Tahun 2014

Tabel di atas menunjukkan bahwa ketika Pengusaha Muslim Bugis di Kabupaten Bone dimintai pendapat tentang apakah ketersediaan sarana mendukung usaha. Hasilnya yaitu: sangat sering 41 orang (41%), sering 48 orang (48%), jarang 8 orang (11%), pernah 0 orang (0%) dan tidak pernah 0 orang (0%). Dengan demikian data tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan sarana mendukung pelaksanaan usaha dengan persentase 48% menjawab sering dan 41% menjawab sangat sering.

Tabel

Tanggapan Responden Tentang Program Pengembangan Usaha

Pilihan	Jawaban	Persentase
Sangat Sering	30	30%

Sering	58	58%
Jarang	6	6%
Pernah	5	5%
Tidak Pernah	1	1%
Jumlah	100	100%

Sumber: Penelitian di Kabupaten Bone Tahun 2014

Tabel di atas menunjukkan bahwa ketika Pengusaha Muslim Bugis di Kabupaten Bone dimintai pendapat tentang program pengembangan usaha. Hasilnya yaitu: sangat sering 30 orang (30%), sering 58 orang (58%), jarang 6 orang (6%), pernah 5 orang (5%) dan tidak pernah 1 orang (1%). Dengan demikian data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pengusaha menjawab sering dengan persentase 58 %.

Tabel

Tanggapan Responden Tentang kerja sama dengan Pengusaha Lain

Pilihan	Jawaban	Persentase
Sangat Sering	36	36%
Sering	43	43%
Jarang	19	19%
Pernah	0	0%
Tidak Pernah	1	1%
Jumlah	100	100%

Sumber: Penelitian di Kabupaten Bone Tahun 2014

Tabel di atas menunjukkan bahwa ketika Pengusaha Muslim Bugis di Kabupaten Bone dimintai pendapat tentang apakah melakukan komunikasi dan kerja sama dengan pengusaha lain. Hasilnya yaitu: sangat sering 36 orang (36%), sering 43 orang (43%), jarang 19 orang (19%), pernah 0 orang (0%) dan tidak pernah 1 orang (1%). Dengan demikian data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pengusaha menjawab sering melakukan komunikasi dan kerja sama dengan persentase 43 %.

Tabel

Tanggapan Responden Tentang Kesulitan Urus Surat Izin Usaha

Pilihan	Jawaban	Persentase
Sangat Sering	20	20%
Sering	31	31%
Jarang	4	4%
Pernah	44	44%
Tidak Pernah	1	1%
Jumlah	100	100%

Sumber: Penelitian di Kabupaten Bone Tahun 2014

Tabel di atas menunjukkan bahwa ketika Pengusaha Muslim Bugis di Kabupaten Bone dimintai pendapat tentang kesulitan urus sarat izin usaha. Hasilnya yaitu: sangat sering 20 orang (20%), sering 31 orang (31%), jarang 4 orang (44%), pernah 1 orang (0%) dan tidak pernah 0 orang (0%). Dengan demikian data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pengusaha menjawab tidak pernah mengalami kesulitan dalam mengurus izin usaha dengan persentase 44 %.

Namun demikian terdapat 31% yang masih sering mengalami kesulitan.

Tabel

Tanggapan Responden Tentang Kebebasan Menjalankan Usaha

Pilihan	Jawaban	Persentase
Sangat Sering	36	36%
Sering	60	60%
Jarang	2	2%
Pernah	2	2%
Tidak Pernah	0	0%
Jumlah	100	100%

Sumber: Penelitian di Kabupaten Bone Tahun 2014

Tabel di atas menunjukkan bahwa ketika Pengusaha Muslim Bugis di Kabupaten Bone dimintai pendapat tentang kebebasan mendirikan dan menjalankan usaha. Hasilnya yaitu: sangat sering 36 orang (36%), sering 60 orang (60%), jarang 2 orang (2%), pernah 2 orang (2%) dan tidak pernah 0 orang (0%). Dengan demikian data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pengusaha menjawab sering diberikan kesempatan berwirausaha dengan persentase 60%.

i. Uji Validitas Variabel X

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kevalidan angket dalam mengumpulkan data. Dasar pengambilan keputusan dalam uji validitas adalah:

- Jika nilai $r_{hitung} >$ nilai r_{tabel} pada nilai signifikansi 5%, maka item angket dinyatakan valid;
- Jika nilai $r_{hitung} <$ nilai r_{tabel} pada nilai signifikansi 5%, maka item angket dinyatakan tidak valid.

Uji validitas dilaksanakan dengan rumus korelasi bivariate person.

Tabel

Hasil Uji Validitas Variabel X1

No Item	r_{hitung}	r_{tabel} 5% (100)	Kriteria
1	0,366	0,195	Valid
2	0,435	0,195	Valid
3	0,694	0,195	Valid
4	0,424	0,195	Valid
5	0,514	0,195	Valid
6	0,404	0,195	Valid
7	0,576	0,195	Valid
8	0,772	0,195	Valid
9	0,567	0,195	Valid
10	0,618	0,195	Valid
11	0,756	0,195	Valid

12	0,363	0,195	Valid
13	0,388	0,195	Valid
14	0,559	0,195	Valid
15	0,586	0,195	Valid
16	0,389	0,195	Valid
17	0,573	0,195	Valid
18	0,336	0,195	Valid
19	0,249	0,195	Valid

Sumber: penelitian pada pengusaha muslim Bugis di Kab. Bone 2014

Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas diatas menyatakan bahwa seluruh butir angket pada variabel pemberdayaan (X) dinyatakan valid dengan nilai r_{hitung} tertinggi yaitu pada butir angket ke 8 dengan nilai 0,772.

ii. Uji Reliabilitas

Uji konsistensi internal (uji reliabilitas) dilakukan dengan menghitung koefisien (cronbach) alpha dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Instrumen yang dipakai dalam variabel tersebut dikatakan andal (reliabel) bila memiliki koefisien Cronbach alpha lebih dari 0,60 (Imam Ghozali, 2001). Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan alat bantu program SPSS versi 21. Adapun ringkasan hasil uji reliabilitas sebagaimana data dalam tabel berikut ini.

Tabel
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Alpha</i>	Kriteria
X1	0,837	Reliabel
Y	0,726	Reliabel

Hasil uji reliabilitas diperoleh nilai *alpha* variabel pemberdayaan (X) 0,837, Pengentasan Kemiskinan (Y) 0,728. Masing-masing variabel memiliki nilai *alpha* lebih besar dari nilai 0,60. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semua angket dalam

penelitian ini reliabel atau konsisten, sehingga dapat digunakan sebagai instrumen penelitian.

iii. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel residu memiliki distribusi normal. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas adalah:

- Jika nilai Asymp.sig. > 0,05, maka data berdistribusi normal;
- Jika nilai Asymp.sig. < 0,05, maka data tidak berdistribusi normal.

Berdasarkan uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Test diperoleh nilai Asymp.sig. sebesar 0,138 lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

iv. Analisis Korelasi

Analisis korelasi bertujuan untuk mengetahui derajat keeratan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi. Dasar pengambilan keputusan dalam uji korelasi adalah:

- Jika nilai signifikansi kurang dari < 0,05, maka terdapat korelasi;
- Jika nilai signifikansi lebih dari > 0,05, maka tidak terdapat korelasi.

Analisis korelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan alat bantu program SPSS versi 21. Adapun ringkasan hasil analisis korelasi sebagaimana data dalam tabel berikut ini:

Correlations

		Pemberdayaa n	Pengentasan Kemiskinan
Pemberdayaan	Pearson Correlation	1	.520**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	100	100

Pengentasan Kemiskinan	Pearson Correlation	.520**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel X terhadap variabel Y adalah 0,000 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X secara parsial dengan variabel Y mempunyai hubungan yang signifikan.

v. Analisis Regresi

Analisis regresi bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dasar pengambilan keputusan dalam uji regresi adalah:

- Jika nilai signifikansi < 0,05, maka hipotesis diterima yang artinya variabel prediktor berpengaruh terhadap variabel kriterium;
- Jika nilai signifikansi > 0,05, maka hipotesis ditolak yang artinya variabel prediktor tidak berpengaruh terhadap variabel kriterium.

Tabel

Analisis Regresi Linear

Variabel	Koefisien Regresi	T	Sig
Konstanta	14,875	1,916	0,058
X ₁	0,433	4,945	0,000
F _{hitung} = 26,449			
R ² = 0,353			

Berdasarkan tabel di atas diperoleh persamaan regresi linear sebagai berikut:

$$Y = 14,875 + 0,433 X_1$$

Adapun interpretasi dari persamaan regresi linear tersebut adalah:

- a. $a = 14,875$ menyatakan bahwa jika X tetap (tidak mengalami perubahan) maka nilai konsistensi Y sebesar 14,875;
- b. $b_1 = 0,433$ menyatakan bahwa jika X bertambah, maka Y akan mengalami peningkatan sebesar 0,433;

vi. Uji Hipotesis

Hipotesis yang diajukan adalah "pemberdayaan berpengaruh terhadap peengentasan kemiskinan (X berpengaruh terhadap Y). Berdasarkan analisis regresi linear berganda diketahui bahwa koefisien regresi dari variabel X (b_1) adalah sebesar 0,433 atau bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa X berpengaruh positif terhadap Y. Untuk mengetahui pengaruh tersebut signifikan atau tidak, selanjutnya nilai koefisien regresi linear ganda dari b_1 ini diuji signifikasinya. Langkah-langkah uji signifikansi koefisien regresi atau disebut juga uji t adalah sebagai berikut.

i. Hipotesis

$H_0 = b_1 = 0 = (X_1 \text{ tidak berpengaruh terhadap } Y).$

$H_1 = b_1 \neq 0 = (X_1 \text{ berpengaruh terhadap } Y).$

ii. Tingkat kepercayaan 95%, $\alpha = 0,05$.

iii. Kriteria pengujian

H_0 diterima jika $-t_{(\alpha/2 : n-k-1)} \leq t \leq t_{(\alpha/2 : n-k-1)}$ atau signifikansi $> 0,05$

H_0 ditolak jika $-t_{(\alpha/2 : n-k-1)} \geq t \geq t_{(\alpha/2 : n-k-1)}$ atau signifikansi $< 0,05$

$t_{\text{tabel}} = t_{(\alpha/2 : n-k-1)} = t_{(0,025, 97)} = 1,988$

iv. Perhitungan

Berdasarkan analisis memakai alat bantu SPSS versi 21 diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 4,945 dengan signifikansi 0,000. Dengan demikian H_0 ditolak sedangkan H_1 diterima, karena nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Maka dikatakan bahwa pemberdayaan (X) berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan (Y).

3. Korelasi Konsep dan Teori tentang Pengaruh Pemberdayaan Pengusaha Muslim Bugis Terhadap Pengentasan Kemiskinan

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh pemberdayaan terhadap pengentasan kemiskinan. Dengan demikian terdapat relevansi antara hasil penelitian dengan teori yang digunakan tentang pemberdayaan. Teori pemberdayaan ekonomi dapat dilakukan dengan kebijakan pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal), memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, pelayanan pendidikan dan kesehatan, penguatan industri kecil, mendorong munculnya wirausaha baru, dan pemerataan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup peningkatan akses bantuan modal usaha, peningkatan akses pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), dan peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal, (Sumidiningrat, 1999).

Hal tersebut sejalan dengan tujuan pemberdayaan yang meliputi: *pertama* menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang (*enabling*). Asumsi dasar yang dibangun adalah bahwa setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan dilakukan dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Maka dapat dirumuskan bahwa dengan memberdayakan pengusaha yang ada serta mendorong terciptanya pengusaha baru akan berdampak secara langsung pada pengurangan angka kemiskinan. Semakin banyak pengusaha yang muncul maka lapangan kerja akan terbuka, perputaran ekonomi akan berjalan dengan baik, serta pembangunan ekonomi masyarakat dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian penelitian ini memperkuat teori dan penelitian yang ada sebelumnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan perhitungan statistik sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan pemberdayaan pengusaha terhadap pengentasan kemiskinan. Artinya

pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan memberdayakan pengusaha. Berdasarkan analisis memakai alat bantu SPSS versi 21 diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 4,945 dengan signifikansi 0,000. Dengan demikian H_0 ditolak sedangkan H_1 diterima, karena nilai signifikansi $0,000 < 0,05$.

Dengan demikian, pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan pemberdayaan pengusaha. Beberapa upaya untuk meningkatkan pemberdayaan pengusaha dapat dilakukan dengan memudahkan akses modal, peningkatan kapasitas melalui pelatihan kewirausahaan, penciptaan iklim usaha yang baik, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Daftar Pustaka

- Chandra, Eka. Dkk. (2003). *membangun forum warga, implementasi gagasan partisipasi dan penguatan masyarakat sipil di kabupaten Bandung*, Bandung : AKATIGA.
- Conyers, Diana. (1994). *Perencanaan Sosial Di Dunia Ketiga*. Terjemahan Susetiawan, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Damanhuri, Didin S. (2012). *Ekonomi Politik dan Pembangunan, teori, kritik, dan solusi bagi Indonesia dan Negara Berkembang*. Bogor : PT. Penerbit IPB Press.
- Deliarnov. (2010). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Faizal Noor, Henry. (2013). *Ekonomi Publik, Ekonomi untuk Kesejahteraan Rakyat*. Padang : Akademia Permata.
- Handayani, Suci. (2006). *Pelibatan Masyarakat Marginal dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif (Sebuah Pengalaman di Kota Solo)*. Solo: Kompip.
- Hessel Nogi S. Tangkilisan. (2005) *Manajmen Publik*. Jakarta : PT. Grasindo.
- Jayadinata, Johara T. (1999). *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah*. Bandung: ITB Bandung.
- Latief, M Syahbudin dan Suryatiningsih. (1994). *Beberapa Kendala Pemberdayaan Masyarakat Miskin, dalam Mubyarto, dkk, 1994, Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal*. Yogyakarta : Aditya Media.

- Marsuki. (2006). *Strategi Memberdayakan Sektor Ekonomi UMKM di Indonesia*, Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Pelajar Slamet, Y. (1994). *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Pradhanawati, Ari. (2005). *Pengembangan Pembangunan Masyarakat*. MTPWK Undip - Departemen Pekerjaan Umum.
- Purba, Jonny (ed). (2005). *Pengelolaan Lingkungan Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sedarmayanti. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soegijoko dan Kusbiantoro. (1997). *Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Soehari, Agus. (2007). *Budaya Visual Indonesia*. Erlangga.
- Soepriyono, (2008). *Nasionalisme dan Kebangkitan Ekonomi*, (Jakarta : INSIDE Pres.
- Soetomo. (2006). *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka.
- Subandi. (2012). *Ekonomi Pembangunan*, Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung : ALFABETA
- Suradisatra, Kedi dkk. (2007). *Dinamika Pembangunan Pertanian dan Perdesaan*. Jakarta : Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Departemen Pertanian.
- Vinod Thomas, dkk, (2001). *The Quality Of Growth "Kualitas Pertumbuhan"*, (akarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wrihatnolo, Randy R. & Riant Nugroho Dwidjowijoto. (2007). *Manajemen Pemberdayaan, sebuah pengantar dan panduan untuk pemberdayaan masyarakat*. Jakarta : PT AlexMedia Komputindo Kelompok Gramedia.